



Keterlibatan Masyarakat dalam Implementasi Penataan Permukiman Kumuh di Kelurahan Mantuil

Irma Khurniawati^{1*}, Nasruddin²

¹⁻²Program Studi Geografi, Universitas Lambung Mangkurat

Email : 2010416220003@mhs.ulm.ac.id¹, nasruddin.luthfie@ulm.ac.id²

*Penulis Korespondensi : 2010416220003@mhs.ulm.ac.id

Abstract. *Slum upgrading is a strategic step in improving the quality of life of urban communities, where its success is largely determined by the active involvement of local residents. This study aims to analyze the level of community involvement in the implementation of slum upgrading in Mantuil Village, South Banjarmasin District. Using a descriptive quantitative approach, data were collected through a structured questionnaire from 98 respondents selected using a purposive sampling technique. Data analysis was conducted descriptively to measure the level of participation in four stages of the activity. The results show that community involvement is in the good category, but has an uneven distribution. The highest average scores were found in the utilization stage (30.44) and maintenance stages (30.23), indicating that community participation is driven by the principle of direct benefit from the infrastructure being built. Conversely, participation in the planning and implementation stages tends to be lower due to structural barriers such as time constraints and respondents' economic burdens. These findings confirm that sustainable settlement upgrading requires synergy between community social capital and government policies that are adaptive to the geographic characteristics of the region, particularly related to tidal flooding vulnerability in riverbank areas.*

Keywords: *Community Engagement; Environmental Management; Mantuil Subdistrict; Slums; Sustainable Development.*

Abstrak. Penataan permukiman kumuh merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan, di mana keberhasilannya sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif warga lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keterlibatan masyarakat dalam implementasi penataan permukiman kumuh di Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur terhadap 98 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengukur tingkat partisipasi pada empat tahapan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat berada pada kategori baik, namun memiliki distribusi yang tidak merata. Skor rata-rata tertinggi ditemukan pada tahap pemanfaatan hasil (30,44) dan tahap pemeliharaan (30,23), yang mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat didorong oleh asas kemanfaatan langsung dari infrastruktur yang dibangun. Sebaliknya, partisipasi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan cenderung lebih rendah akibat hambatan struktural berupa keterbatasan waktu dan beban ekonomi responden. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan penataan permukiman memerlukan sinergi antara modal sosial masyarakat dengan kebijakan pemerintah yang adaptif terhadap karakteristik geografis wilayah, terutama terkait kerentanan banjir rob di kawasan tepian sungai.

Kata Kunci: Manajemen Lingkungan; Mantuil Subdistrict; Pemberdayaan Masyarakat; Permukiman Kumuh; Pengembangan Berkelanjutan.

1. LATAR BELAKANG

Permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam menunjang kualitas hidup layak serta meningkatkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, sektor perumahan dan permukiman perlu dikembangkan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan (Suci, 2022). Permukiman kumuh biasanya muncul di wilayah yang kurang mendapat perhatian pemerintah maupun masyarakat, dipicu rendahnya kesadaran warga terhadap lingkungan, kepadatan penduduk akibat urbanisasi dan keterbatasan lahan. Untuk

menanggulangnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2018). Identifikasi kawasan permukiman kumuh dilakukan melalui indikator kualitas bangunan, pengelolaan limbah, sistem drainase, ketersediaan air bersih, ruang terbuka hijau serta pola fisik permukiman (Apriliani *et al.*, 2022).

Eksistensi permukiman kumuh secara nyata memberikan kontribusi negatif yang signifikan terhadap penurunan kualitas lingkungan fisik dan keseimbangan ekosistem di sekitarnya, yang utamanya dipicu oleh perilaku kolektif sebagian penduduk dalam membuang sampah rumah tangga secara sembarangan tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan alam. Penumpukan limbah padat yang tidak terkelola dengan baik ini, diperburuk oleh keterbatasan sarana prasarana pembuangan yang memadai, menciptakan kondisi sanitasi buruk yang berisiko tinggi memicu berbagai wabah penyakit menular berbahaya hingga menyebabkan fatalitas atau kematian bagi masyarakat setempat. Fenomena ini juga berbanding lurus dengan permasalahan sosial dan ekonomi, di mana permukiman kumuh menjadi cerminan dari tingginya tingkat kemiskinan struktural akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia serta minimnya keterampilan kerja spesifik pada kelompok masyarakat tersebut. Keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami kemudian menciptakan hambatan besar bagi penduduk dalam mengakses fasilitas pendidikan formal yang berkualitas, sehingga berimplikasi pada rendahnya tingkat kesadaran terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup. Pada akhirnya, rendahnya latar belakang pendidikan ini memaksa mayoritas penduduk untuk menggantungkan hidup pada sektor pekerjaan informal dengan tingkat pendapatan yang tidak menentu dan sangat rendah, sehingga menjebak masyarakat dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus dan terus memengaruhi stabilitas ekonomi di kawasan permukiman kumuh tersebut.

Tingginya tingkat kriminalitas dan penyimpangan sosial menjadi masalah menonjol di permukiman kumuh. Tekanan ekonomi serta rendahnya pendidikan mendorong masyarakat melakukan tindakan seperti pencurian, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, hingga praktik premanisme demi memenuhi kebutuhan hidup. Keempat, keretakan rumah tangga sering terjadi akibat kesulitan ekonomi. Konflik internal yang dipicu oleh ketiadaan pekerjaan tetap atau pendapatan memadai bagi kepala keluarga meningkatkan risiko disintegrasi rumah tangga dan ketidakharmonisan pernikahan di lingkungan tersebut. (Saputra *et al.*, 2022).

Pesatnya perkembangan perkotaan dan tingginya laju urbanisasi di wilayah perkotaan berimplikasi pada meningkatnya kepadatan penduduk serta penurunan kualitas lingkungan permukiman. Kondisi tersebut mendorong munculnya kawasan permukiman kumuh yang memerlukan penanganan strategis dari pemerintah. Permasalahan permukiman kumuh menjadi isu penting dalam kajian sosial perkotaan karena berkaitan dengan dinamika urbanisasi, ketimpangan sosial, serta efektivitas kebijakan publik dalam mengelola ruang permukiman (Zahra & Yulyana, 2025). Partisipasi masyarakat merupakan instrumen krusial dalam pembangunan yang didefinisikan sebagai proses keterlibatan aktif warga secara sadar dan sukarela dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan atau program yang memengaruhi kehidupan mereka. Secara substansial, partisipasi ini tidak hanya terbatas pada kehadiran fisik, melainkan mencakup kontribusi nyata berupa tenaga, ide, pemikiran kritis, maupun sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam hal ini, keterlibatan aktif warga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial guna memastikan bahwa program pembangunan tepat sasaran serta akuntabel. Melalui ruang aspirasi tersebut, masyarakat memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir sedini mungkin. Apabila kita melihat dalam konteks perbaikan permukiman, tingginya tingkat partisipasi mencerminkan adanya *sense of belonging* (rasa memiliki) yang kuat dari warga terhadap lingkungannya. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi faktor penentu dalam menjamin keberlanjutan program perbaikan kualitas pemukiman agar tidak kembali menjadi kumuh di masa depan. (Azis & Giriwati, 2024).

Pemahaman ini relevan dalam penataan permukiman kumuh, termasuk di Kelurahan Mantuil, karena keterlibatan aktif warga meningkatkan efektivitas kebijakan, kualitas lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan variasi pengaruh partisipasi masyarakat: di Kelurahan Rajawali dan Budiman, Kota Jambi, keterlibatan warga terkait kualitas lingkungan permukiman (Simbang *et al.*, 2019) sedangkan di Medan, partisipasi warga berperan dalam perbaikan kualitas permukiman kumuh melalui kegiatan kolektif dan strategi peningkatan lingkungan (Simarmata *et al.*, 2024).

Bentuk keterlibatan masyarakat dalam penataan permukiman kumuh mencakup kontribusi tenaga, ide atau gagasan, serta pengawasan. Keterlibatan tenaga terlihat melalui partisipasi fisik warga, seperti kerja bakti dan pembangunan fasilitas permukiman, sedangkan ide atau gagasan muncul saat warga memberikan masukan dan rekomendasi pada tahap perencanaan dan evaluasi program. Keterlibatan dalam pengawasan memungkinkan

masyarakat memantau pelaksanaan kegiatan agar sesuai rencana dan standar kualitas. Beberapa penelitian mendukung hal ini, antara lain Nurjanah & Safrul (2021) yang menekankan partisipasi tenaga masyarakat dalam pembangunan drainase, penelitian oleh Apriyani & Arif (2019) yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan desa serta Tobade dkk. (2019) yang menyoroti peran masyarakat dalam pengawasan kegiatan pembangunan. Secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat dalam ketiga aspek tersebut berperan penting dalam keberhasilan penataan permukiman kumuh dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Penataan permukiman kumuh merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kualitas hunian melalui perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Menurut Budihardjo (2014), permukiman kumuh bukan hanya persoalan fisik bangunan, melainkan manifestasi dari masalah sosial-ekonomi masyarakat kota. Oleh karena itu, pendekatan penataan harus melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek.

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara teoritis diartikan sebagai keikutsertaan warga dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi (Yunus, 2012). Dalam konteks penataan permukiman, partisipasi ini menjadi krusial untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) program. Masyarakat yang terlibat sejak tahap perencanaan cenderung memiliki rasa memiliki (*sense of ownership*) yang lebih tinggi sehingga fasilitas yang dibangun akan terjaga dengan lebih baik (Anwar et al., 2021).

Tingkat keterlibatan ini dapat diukur melalui beberapa tahapan krusial, yaitu:

- a. Tahap Perencanaan: Meliputi keterlibatan dalam pertemuan warga, pemberian usulan, dan pengambilan keputusan terkait bentuk penataan.
- b. Tahap Pelaksanaan: Mencakup kontribusi tenaga, materi, maupun dukungan moral selama proses konstruksi atau perbaikan lingkungan berlangsung.
- c. Tahap Pemanfaatan: Sejauh mana masyarakat menggunakan hasil penataan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas mereka.
- d. Tahap Pemeliharaan: Kesadaran masyarakat untuk merawat infrastruktur yang telah dibangun agar kualitas lingkungan tidak kembali menurun (kumuh kembali).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas penataan permukiman sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat. Jika keterlibatan hanya bersifat formalitas, seperti manipulasi atau terapi dalam tangga partisipasi Arnold (Arnstein's Ladder), program

sering gagal mencapai target jangka panjangnya. Penelitian oleh Simarmata, Lubis, dan Thoha (2024) menemukan bahwa rendahnya keterlibatan warga dalam program pemukiman kumuh menghambat perbaikan kualitas lingkungan, sementara peningkatan partisipasi masyarakat dapat mendorong perubahan nyata dalam lingkungan permukiman kumuh. Selain itu, Anisa (2025) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat secara signifikan meningkatkan efektivitas pembangunan permukiman kumuh, menggarisbawahi pentingnya keterlibatan yang tulus dan aktif dalam setiap tahap program perbaikan lingkungan.

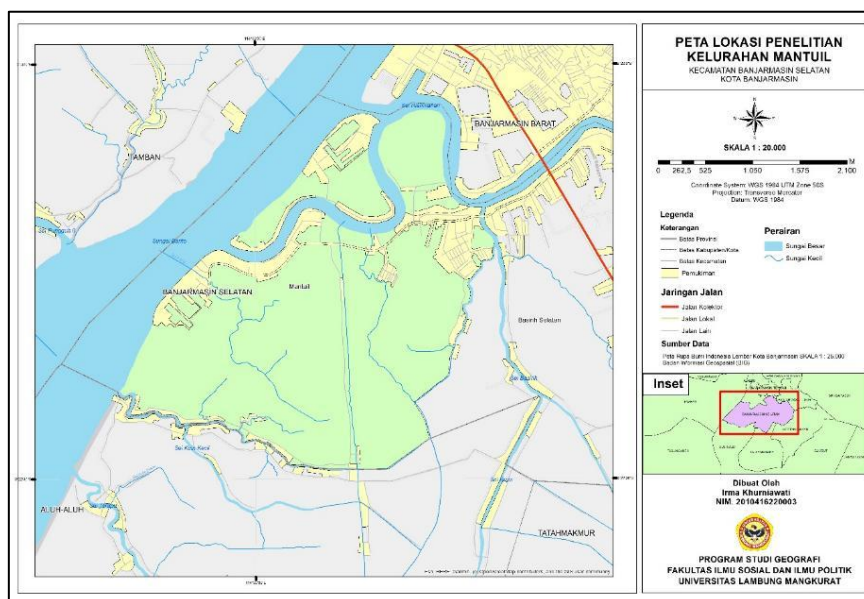
3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis keterlibatan masyarakat dalam implementasi penataan permukiman kumuh di Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Pendekatan deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh gambaran empiris mengenai karakteristik dan tingkat partisipasi masyarakat melalui pengukuran data numerik tanpa melakukan perbandingan atau pengujian hubungan antar variabel (Sugiyono, 2017). Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan pertimbangan representativitas, karena Kelurahan Mantuil merupakan kawasan permukiman kumuh yang menunjukkan kompleksitas sosial, ekonomi dan budaya yang tinggi sehingga relevan untuk menelaah kontribusi masyarakat dalam proses penataan permukiman.

Populasi penelitian meliputi seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Mantuil, berjumlah 4.780 KK yang tersebar di sepuluh RT. Sampel dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu masyarakat yang memiliki pengalaman langsung atau terlibat dalam program penataan permukiman. Kriteria sampel mencakup warga yang berdomisili di wilayah permukiman kumuh sesuai Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 215 Tahun 2022 Tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh, masyarakat yang terlibat aktif maupun pasif dalam kegiatan penataan permukiman, serta warga berusia minimal 18 tahun. Berdasarkan perhitungan dengan rumus Slovin menggunakan tingkat kepercayaan 90% dan margin of error 10%, diperoleh jumlah sampel sebanyak 98 responden.

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan lokal yang terlibat aktif sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan program, peta wilayah, data demografi dan literatur ilmiah terkait. Instrumen diuji validitasnya menggunakan korelasi item-total dan reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha*, menunjukkan nilai antara 0,598–0,827, yang mengindikasikan instrumen konsisten dan dapat diandalkan. Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan rata-

rata, median, modus dan standar deviasi serta pengujian hipotesis deskriptif dengan membandingkan rata-rata skor kuesioner terhadap kategori sedang (3,00) untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi penataan permukiman kumuh.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Mantuil merupakan wilayah administrasi terluas di Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan cakupan area sebesar 12,22 km² atau menyumbang sekitar 31,93% dari total luas kecamatan.

Tabel 1. Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
Mantuil	12,22	31,93
Kelayan Selatan	1,10	2,87
Kelayan Timur	4,69	12,25
Tanjung Pagar	3,99	10,41
Pemurus Dalam	4,30	11,24
Pemurus Baru	1,44	3,75
Murung Raya	0,67	1,74
Kelayan Dalam	0,34	0,88
Kelayan Tengah	0,19	0,51
Pekauman	0,37	0,96
Kelayan Barat	0,29	0,77
Basirih Selatan	8,68	22,69
Banjarmasin Selatan	38,28	100,00

Sumber: Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam Angka, 2025

Kondisi klimatologi di wilayah ini dicirikan oleh curah hujan yang cukup tinggi, di mana dalam satu dekade terakhir, puncak curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan total 3.378 mm dan intensitas hari hujan mencapai 297 hari pada tahun 2024. Karakteristik ini berkaitan dengan elevasi wilayah yang rendah, yakni rata-rata -0,16 mdpl, sehingga kawasan ini masuk dalam kategori daerah rawan genangan.

Tabel 2. Jumlah Hari dan Curah Hujan Tahun 2014-2024.

Tahun	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)
2015	2.308	193
2016	2.486	202
2017	2.817	168
2018	2.365	160
2019	2.759	142
2020	3.378	250
2021	3.259	232
2022	2.788	258
2023	2.170	181
2024	2.791	297

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika/Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam Angka, 2025.

Secara demografis, jumlah penduduk di Kelurahan Mantuil pada tahun 2024 mencapai 15.963 jiwa dengan tingkat kepadatan sebesar 1.306,30 jiwa/km². Meskipun jumlah penduduk meningkat, kepadatan di wilayah ini masih merupakan yang terendah di antara kelurahan lain di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan, 2021-2024.

Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	2021	2022	2023	2024
Mantuil	15.240	15.536	15.577	15.963
Kelayan Selatan	13.879	13.841	13.892	13.983
Kelayan Timur	20.440	20.868	20.952	21.700
Tanjung Pagar	11.172	11.598	11.781	12.520
Pemurus Dalam	23.522	23.625	23.777	24.253
Pemurus Baru	16.464	16.511	16.558	16.882
Murung Raya	13.928	13.883	13.949	14.082
Kelayan Dalam	10.643	10.549	10.575	10.644
Kelayan Tengah	7.847	7.843	7.889	7.881
Pekauman	9.554	9.322	9.335	9.234
Kelayan Barat	6.488	6.325	6.313	6.253
Basirih Selatan	16.532	16.978	17.092	17.243
Banjarmasin Selatan	165.709	166.879	167.690	170.638

Sumber : Kecamatan Banjarmasin Selatan Dalam Angka, Tahun 2022-2025

Profil responden penelitian didominasi oleh kelompok usia produktif (18-59 tahun) dengan persentase laki-laki sebesar 68,37% dan perempuan sebesar 31,63%. Sebagian besar responden memiliki latar belakang pekerjaan di sektor swasta dan buruh, yang menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi pada sektor formal dan informal di kawasan tersebut.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin.

No	Karakteristik	Kategori	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Usia	Usia Produktif (18-59 Tahun)	91	92,86
		Usia Non-Produktif (≥ 60 Tahun)	7	7,14
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki	67	68,37
		Perempuan	31	31,63
Total			98	100

Sumber : Hasil Olah Data, 2025

Berdasarkan hasil uji instrumen, seluruh item pernyataan dalam variabel penelitian dinyatakan valid dengan nilai r -hitung $> 0,198$ dan reliabel dengan nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60, sehingga data layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian.

Variabel Penelitian	Item	r-Hitung	r-Tabel	Keterangan	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Partisipasi Perencanaan (P1)	P1.1 - P1.7	0,419 - 0,791	0,198	Valid	0,882	Reliabel
Partisipasi Pelaksanaan (P2)	P2.1 - P2.7	0,607 - 0,738	0,198	Valid	0,905	Reliabel
Partisipasi Pemanfaatan (P3)	P3.1 - P3.7	0,532 - 0,805	0,198	Valid	0,868	Reliabel
Partisipasi Pemeliharaan (P4)	P4.1 - P4.7	0,532 - 0,805	0,198	Valid	0,904	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data, 2025

Data statistik deskriptif menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat pada empat tahap kegiatan. Tahap Pemanfaatan Hasil (P3) memperoleh skor rata-rata tertinggi sebesar 30,44, disusul oleh Tahap Pemeliharaan (P4) sebesar 30,23. Sementara itu, Tahap Perencanaan (P1) dan Tahap Pelaksanaan (P2) masing-masing memiliki skor 29,19 dan 28,37.

Tabel 6. Statistik Deskriptif Variabel Partisipasi Masyarakat.

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Std. Deviasi
P1 – Partisipasi dalam Tahap Perencanaan	98	19	35	29,19	28,00	4,235
P2 – Partisipasi dalam Tahap Pelaksanaan	98	18	35	28,37	28,00	4,544
P3 – Partisipasi dalam Tahap Pemanfaatan	98	23	35	30,44	29,50	3,515
P4 – Partisipasi dalam Tahap Pemeliharaan	98	21	35	30,23	29,50	3,868

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Keterlibatan masyarakat dalam implementasi penataan permukiman kumuh di Kelurahan Mantuil menunjukkan pola partisipasi yang dinamis pada setiap fasenya. Berdasarkan data karakteristik responden, dominasi kelompok usia produktif (92,86%) dan keterlibatan laki-laki (68,37%) menjadi determinan penting dalam mobilisasi tenaga kerja pada proyek fisik di lapangan. Namun, rendahnya capaian pada Tahap Pelaksanaan (28,37) menunjukkan adanya korelasi antara latar belakang ekonomi responden (mayoritas karyawan swasta dan buruh) dengan keterbatasan durasi keterlibatan. Hal ini mengonfirmasi bahwa kendala waktu dan tuntutan nafkah menjadi hambatan struktural bagi masyarakat sektor informal untuk berpartisipasi secara intensif dalam proses konstruksi fisik, meskipun secara prinsipil mereka mendukung program tersebut.

Tingginya skor rata-rata pada Tahap Pemanfaatan (30,44) dan Tahap Pemeliharaan (30,23) mengindikasikan bahwa keberhasilan penataan permukiman di Kelurahan Mantuil sangat ditentukan oleh asas kemanfaatan (*utility*). Masyarakat cenderung memberikan respon partisipatif yang lebih kuat ketika hasil pembangunan seperti transformasi titian kayu menjadi jalan beton yang mana hal ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mobilitas dan produktivitas ekonomi mereka. Fenomena ini menciptakan *sense of ownership* yang tinggi, di mana masyarakat secara swadaya melakukan perawatan infrastruktur. Temuan ini selaras dengan teori partisipasi yang menekankan bahwa keberlanjutan suatu program penataan kawasan kumuh sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memandang hasil pembangunan tersebut sebagai aset kolektif yang vital bagi ruang hidup mereka.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu mengenai penataan permukiman tepi air, hasil penelitian di Kelurahan Mantuil menunjukkan adanya unsur spesifik terkait tantangan geografis berupa kerentanan terhadap banjir rob dan elevasi daratan yang rendah yakni rata-rata -0,16 mdpl. Meskipun partisipasi pemeliharaan berada pada kategori tinggi, faktor eksternal berupa kondisi alam tetap menjadi variabel yang sulit dikendalikan hanya melalui aksi komunitas semata. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara partisipasi masyarakat dan dukungan teknis makro dari pemerintah, terutama dalam sistem drainase integratif serta pengelolaan sampah hilir, merupakan prasyarat mutlak. Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan tidak akan mencapai hasil optimal secara permanen apabila tidak didukung oleh kebijakan penataan ruang yang adaptif terhadap karakteristik wilayah pesisir atau tepian sungai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam implementasi penataan permukiman kumuh di Kelurahan Mantuil berada pada kategori yang baik dengan pola partisipasi yang didominasi oleh aspek pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Tingginya skor pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan menunjukkan bahwa keberhasilan program penataan sangat dipengaruhi oleh asas kemanfaatan langsung yang dirasakan masyarakat, terutama melalui perbaikan infrastruktur jalan dan titian beton yang mendukung mobilitas serta ekonomi warga. Sebaliknya, partisipasi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan cenderung lebih rendah akibat hambatan struktural berupa keterbatasan waktu dan tuntutan ekonomi responden yang mayoritas bekerja di sektor informal. Selain itu, faktor geografis berupa kerentanan terhadap banjir rob menjadi tantangan eksternal utama yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui aksi komunitas, sehingga diperlukan sinergi teknis yang lebih kuat dari pemerintah kota. Sebagai rekomendasi, langkah selanjutnya perlu difokuskan pada penguatan sistem koordinasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sampah serta drainase terintegrasi yang adaptif terhadap karakteristik wilayah tepian sungai. Pemerintah juga disarankan untuk menyusun jadwal program yang lebih fleksibel guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan agar konsep penataan lebih selaras dengan kebutuhan warga lokal.

Saran

Pemerintah Kota Banjarmasin disarankan untuk mengintegrasikan program penataan fisik dengan sistem pengelolaan sanitasi dan drainase yang adaptif terhadap karakteristik hidrologi serta kerentanan banjir rob di Kelurahan Mantuil. Selain itu, diperlukan fleksibilitas dalam mekanisme koordinasi program guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan. Secara akademis, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan lokus penelitian atau menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi dampak jangka panjang penataan infrastruktur terhadap ketahanan sosial ekonomi masyarakat di kawasan permukiman tepi air.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Banjarmasin dan pihak Kelurahan Mantuil atas bantuan data serta perizinan dalam pelaksanaan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan konstruktifnya, serta kepada masyarakat Kawasan Antasan Bondan yang telah berpartisipasi sebagai responden. Seluruh kontribusi pihak terkait telah memungkinkan penelitian ini terselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Anisa, M. (2025). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pembangunan kawasan permukiman kumuh. *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis*, 1(1). <https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i1.4750>
- Apriliansi, D., Hedayani, E., Utomo, B., & Setianto, H. (2022). Faktor-faktor penyebab tumbuhnya permukiman kumuh di Kelurahan Tuan Kentang Kota Palembang. *Review of Urbanism and Architectural Studies*, 20(2), 73–84. <https://doi.org/10.21776/ub.ruas.2022.020.02.7>
- Apriyani, L., & Arif, D. B. (2019). Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 61. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v2i2.17991>
- Azis, I. P. A., & Giriwati, N. S. S. (2024). Peranan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Kotalama, Kota Malang. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 13(3), 125–129. <https://doi.org/10.32315/jlbi.v13i3.377>
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin. (2025). *Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam Angka 2025*.
- Isya, Z. R. S. (2024). Tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang Repository.

- Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 215 Tahun 2022 tentang penetapan lokasi permukiman kumuh. (2022).
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785*.
- Nurjanah, & Safrul, R. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan drainase jalan ditinjau dari aspek tenaga di Desa Catur Karya Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *JAPB (Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis, 4*, 1114–1129.
- Saputra, W., Sukmaniar, & Hermansyah, M. H. (2022). Permukiman kumuh perkotaan: Penyebab, dampak dan solusi. *Environmental Science Journal (ESJo): Jurnal Ilmu Lingkungan, 1*(1), 12–17. <https://doi.org/10.31851/esjo.v1i1.10929>
- Simarmata, S. G., Lubis, S. N., & Thoha, A. S. (2024). A study on the relationship between community participation and the improvement of slum settlement quality in Medan City, Indonesia. *Asian Journal of Environment & Ecology, 23*(4), 1–15. <https://doi.org/10.9734/ajee/2024/v23i4536>
- Simbang, A., Rosyani, & Suandi. (2019). Keterkaitan partisipasi masyarakat terhadap kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Rajawali dan Kelurahan Budiman Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 2*(1). <https://doi.org/10.22437/jpb.v2i1.5101>
- Suci, N. W. (2022). Strategi penanganan permukiman kumuh melalui pembangunan rumah susun di Surabaya. *Jurnal Mahasiswa, 4*(4), 235–245.
- Tobade, A., Tampi, G. B., & Ruru, J. M. (2019). Partisipasi masyarakat pada pengawasan pembangunan di Desa Taripa Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso. *Jurnal Administrasi Publik, 5*(78).
- Zahra, N. A., & Yulyana, E. (2025). Strategi penanganan kawasan permukiman kumuh oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (Studi kasus pada Kelurahan Medan Satria). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 11*(1), 41–62. <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i1.4506>